

KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KAITANNYA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN SERTA FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Oleh:

Lilis Siti Badriah

E-mail: lilis.badriah@unsoed.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

This study aims to analyze the causes of income distribution inequality, the relationship between income inequality, poverty, and economic growth, explain the factors that influence it, find the right solution to overcome income distribution inequality and poverty, and analyze the role of digital economy in the industrial revolution era 4.0 in reducing inequality in income distribution and poverty. This research method uses library research. The results showed that high population growth, inflation, development disparities between regions, the number of investments in capital intensive projects, import substitution industry policies, the worsening of developing countries' terms of trade in international trade, shifts in the structure of production from agriculture to industry and population shifts to the urban sector, inequality in educational development and the level of expertise of labor, and inequality in labor income. The higher economic growth reaches a certain level of income, the inequality of income distribution will be lower, and ultimately, poverty will decrease. Solutions to address income inequality and poverty require integrated policies from various social, economic, and legal aspects. Sharing economy in the era of the industrial revolution 4.0 has become a very important role in providing opportunities for SMEs and all levels of society to actively participate in the development process despite their limited resources.

Keywords : *Inequality of income distribution, Economic growth, Poverty, Sharing economy, Industrial revolution 4.0.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketimpangan distribusi pendapatan, keterkaitan antara ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan, dan menganalisis peran digital ekonomi pada era revolusi industri 4.0 dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Metode penelitian ini menggunakan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi, ketimpangan pembangunan antara wilayah, banyaknya investasi pada proyek padat modal, kebijakan industri substitusi impor, memburuknya *term of trade* negara sedang berkembang dalam perdagangan internasional, pergeseran struktur produksi dari sektor pertanian ke industri dan pergeseran penduduk ke sektor perkotaan, ketimpangan pengembangan pendidikan dan tingkat keahlian tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan tenaga kerja. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi sampai pada suatu tingkat pendapatan tertentu, maka ketimpangan distribusi pendapatan akan semakin rendah dan pada akhirnya kemiskinan berkurang. Solusi untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan memerlukan kebijakan yang terintegrasi dari berbagai aspek social, ekonomi, dan hukum. *Sharing economy* dalam era revolusi industri 4.0

menjadi sangat penting perannya dalam memberi kesempatan kepada UMKM dan semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan meskipun dalam keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya.

Kata kunci: Ketimpangan distribusi pendapatan, Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan, *Sharing ekonomi*, Revolusi industri 4.0

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan tepat guna akan berimplikasi pada model pembangunan yang dinamis, tidak hanya dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi tetapi juga mencakup terwujudnya pemerataan secara lokal, sektoral, dan individual. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2009).

Dalam implementasi proses pembangunan, antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, sepertinya menjadi suatu *trade off* sebagai tujuan yang ingin dicapai, yaitu pembangunan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi atautkah pembangunan dalam rangka pemerataan. Apabila target pembangunan itu adalah pertumbuhan yang tinggi, maka masalah pemerataan akan menjadi terabaikan. Kalau yang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah hanya sedikit orang yang lebih kaya, maka pertumbuhan ekonomi itu hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang itu saja sedangkan kelompok masyarakat yang tidak ikut berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan, mereka tidak mendapatkan manfaat.

Sedangkan apabila dalam proses penciptaan pertumbuhan ekonomi itu semakin banyak masyarakat yang berkontribusi, maka manfaatnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas, walaupun konsekuensinya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak akan terlalu tinggi, karena adanya perbedaan kemampuan antar kelompok masyarakat dalam menciptakan pertumbuhan itu sendiri atau karena untuk mampu mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih banyak dengan kemampuan yang berbeda-beda, sebagian dana pembangunan dialokasikan untuk mendorong peningkatan kemampuan masyarakat itu untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan yang dilaksanakan.

Pada umumnya, strategi yang diambil dalam pelaksanaan pembangunan adalah strategi untuk menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan akan terjadi efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Dengan dasar pemikiran tersebut diharapkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu menggerakkan perekonomian baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran sehingga pada akhirnya diharapkan akan mampu menciptakan pemerataan. Tetapi, pada umumnya pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ternyata memberikan penekanan pada pembangunan sektoral yang relatif parsial dalam perencanaan dan penanganannya sehingga berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan yang relatif tidak terpadu dan komprehensif.

Identifikasi Masalah

Efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) dari proses pembangunan yang dilaksanakan tidak semuanya sesuai harapan. Fenomena yang ada di Indonesia pun menunjukkan bahwa *trickle down effect* itu tidak terjadi. Investasi yang dilakukan di pusat-pusat pertumbuhan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ternyata tidak diikuti oleh pemerataan. Efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) yang diharapkan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak terjadi, akibatnya pertumbuhan cenderung diikuti ketimpangan yang tinggi pula (Myrdal (1957) dalam Kuncoro, 2010).

Dalam pelaksanaan pembangunan, setidaknya terdapat dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data BPS (2018), fakta memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia menurut harga kostan 2010 selama periode tahun 2011-2018 cenderung berfluktuasi dimana pada tahun 2011 sebesar 4,65% dan pada tahun 2014 menurun menjadi 3,93% dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,95%. Sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, dengan indikator Gini Ratio, pada tahun 2011 mencapai 0,399 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,387. Walaupun demikian, menurut kriteria Bank Dunia, jika nilai Gini Ratio berada antara 0,36-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang. Terkait dengan kondisi tersebut, data memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011 sebesar 30,02 juta dan menurun pada tahun 2018 menjadi 25,81 juta jiwa. Walaupun secara angka mengalami penurunan, tetapi secara absolut jumlah tersebut masih relatif besar. Jumlah penduduk miskin di Desa lebih besar daripada di Kota. Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di kota sebesar 6,96% sedangkan di Desa sebesar 13,15%. Menurut studi empiris yang dilakukan oleh Suharyadi et al (2012) bahwa pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuhan sektor industri, walaupun memberikan kontribusi relatif besar terhadap pembentukan PDB Indonesia, tetapi dampak terhadap pengurangan kemiskinan relatif kecil. Kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan berasal dari sektor jasa.

Fakta tersebut diatas memperkuat bukti bahwa terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan masyarakat di Indonesia. Artinya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia banyak diciptakan oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi sehingga belum semua masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat proses pembangunan yang dilaksanakan. Adam Smith (1776) dalam Todaro (2009) mengatakan bahwa tidak ada masyarakat yang menjadi maju dan bahagia apabila sebagian besar masyarakat itu hidup miskin dan sengsara.

Di sisi lain, seiring dengan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dalam era Revolusi Industri 4.0, dianggap bahwa *sharing economy* melalui *digital economy* menjadi salah satu aspek penting dalam rangka memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk dapat berkontribusi secara aktif dalam aktivitas ekonomi walaupun dalam keterbatasan sumberdaya yang dimiliki.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka beberapa permasalahan yang timbul antara lain:

1. Apa penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan?
2. Bagaimana keterkaitan antara ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi ketimpangan dalam distribusi pendapatan tersebut?
4. Bagaimana peran digital ekonomi dalam mendukung upaya pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan dalam era Revolusi Industri 4.0?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketimpangan distribusi pendapatan, keterkaitan antara ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan, dan menganalisis peran digital ekonomi pada era revolusi industri 4.0 dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.

Kegunaan Penelitian

Tinjauan Literatur

1. Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan ekonomi

Pembangunan ekonomi menekankan pada kemampuan suatu negara dalam meningkatkan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk dan disertai dengan terjadinya perubahan dalam struktur perekonomian dari struktur pertanian ke struktur industri. Kemudian, dalam paradigma pembangunan modern beberapa ekonom modern mulai mengemukakan *dethronement of GNP* (penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi), pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan, dan penurunan tingkat pengangguran. Kondisi ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, 2010).

Hal tersebut sejalan dengan sebagian ahli ekonomi yang mengartikan pembangunan ekonomi sebagai *economic development is growth plus change*, yaitu pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak saja hanya fokus kepada perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi. Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Jhon Stuart Mill) maupun ekonom Neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2004).

Simon Kuznets (1955) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Adapun faktor-faktor pertumbuhan ekonomi menurut Todaro (2006) yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi bagi para ahli ekonomi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih penting. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan nilai tambah yang tinggi. Kemajuan teknologi berarti ditemukannya cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa secara lebih baik dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) yang dikemukakan oleh Solow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dihasilkan oleh faktor-faktor di dalam proses produksi, misalnya dengan meningkatkan investasi atau memperkenalkan perubahan teknologi. Sejalan dengan teori Solow, model pertumbuhan Romer juga menunjukkan adanya imbas teknologi dimana keuntungan produktivitas suatu perusahaan atau industri menimbulkan keuntungan produktivitas di perusahaan atau industri lainnya (Romer, 2012).

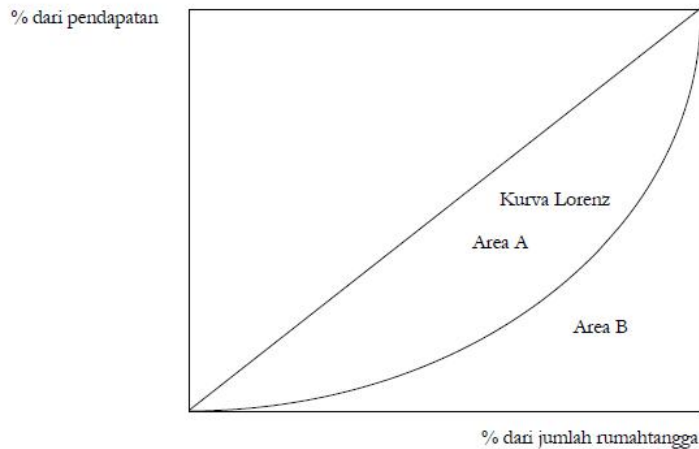
2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan pendapatan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan per kapita antar kelompok masyarakat. Menurut Todaro (2009), bagian pendapatan yang diterima golongan penduduk berpendapatan tinggi jauh lebih besar. Disamping itu diperkuat pula oleh laju pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi. Proses ini telah menyebabkan yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Pola pembagian pendapatan yang lebih merata lebih mampu berperan selaku indikator tingkat kemakmuran penduduk. Sebaliknya pola pembagian pendapatan yang merata tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lebih tepat disebut pemerataan kemiskinan dibandingkan dengan pemerataan kemakmuran. Dengan demikian, baik faktor pertumbuhan ekonomi yang tinggi maupun pola pembagian pendapatan yang semakin merata, diperlukan sekali di dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Kebijaksanaan pemerataan hasil-hasil pembangunan ini tidaklah mudah. Dalam hal ini, Kuznets (1955) telah mencari hubungan antara pembagian pendapatan relatif dengan tingkat pendapatan per kapita. Dengan memakai data antar negara (*cross-section*) dan data observasi di setiap negara (*time series*), Kuznets menemukan relasi antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita dalam bentuk huruf U terbalik. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Pada akhir proses pembangunan, ketimpangan pendapatan menurun, yaitu pada saat sektor industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi atau penciptaan pendapatan.

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan adalah Gini Ratio. Nilai Rasio Gini berkisar antara nol dan satu. Bila nilai Rasio Gini sama dengan 0 maka distribusi pendapatan merata sempurna dan bila Rasio Gini sama dengan satu diartikan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna. Semakin tinggi nilai Rasio Gini semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara.

Sebaliknya semakin rendah nilai Rasio Gini berarti semakin merata distribusinya. Ketidakmerataan yang diukur dengan koefisien Rasio Gini dinyatakan tinggi jika berkisar antara 0,5 – 0,7; sedang jika berkisar 0,36 – 0,49 dan rendah jika berkisar antara 0,2 – 0,35.



Gambar 1: Kurva Lorenz

Kurva Lorenz merupakan kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pendapatan kumulatif. Jika kurva lorenz tidak diketahui, maka pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan rasio indeks gini yang dikembangkan oleh Gini (1921).

Kurva Lorenz diproksi atas setiap kelas interval dari pendapatan, sehingga luas area B pada kurva tersebut dapat diproksi dengan koefisien Gini:

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

X_k adalah proporsi kumulatif dari jumlah rumah tangga, untuk $k = 0, \dots, n$ dengan $X_0 = 0$ dan $X_n = 1$. Y_k adalah proporsi kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga sampai kelas ke- k untuk $k = 0, \dots, n$ dengan $Y_0 = 0$ dan $Y_n = 1$.

Kurva Lorenz di atas dapat didekati dengan memperoleh fungsi non linier dengan cara melakukan plotting titik-titik pasangan atau koordinat interval pendapatan dan jumlah rumah tangga kumulatif dengan jumlah kelas tertentu. Semakin banyak kelas yang digunakan, maka akan semakin halus kurva lorenz yang diperoleh. Pada gambar kurva Lorenz, koefisien gini sebesar luas area A dibagi luas area (A+B). karena $(A+B) = 0,5$ maka $G = A/0,5 = 2A = 1-2B$. Jika kurva Lorenz dinyatakan dengan fungsi $Y = L(X)$, maka nilai B dapat diperoleh dengan mencari nilai integral dari fungsi tersebut yaitu $\int_0^1 L(X) dX$

sehingga koefisien gini menjadi :

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(X) dX$$

3. Kemiskinan

Menurut Bappenas (2009), kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat. Pendekatan yang digunakan meliputi: *basic needs* (ketakmampuan memenuhi kebutuhan dasar); *income poverty* (tiadanya kepemilikan aset dan alat produksi), *basics capability* (keterbatasan kemampuan dasar untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat); *social welfare* (menekankan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan); serta *subjective* (cara pandang kemiskinan dari sudut orang miskin sendiri).

Menurut Sumodiningrat (2002), masyarakat miskin secara umum ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (*powerlessness*) dalam hal: (a). memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic need deprivation*); (b).melakukan kegiatan usaha produktif (*unproductiveness*); (c). menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi (*inaccessibility*); (d). menentukan nasibnya diri sendiri, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (*vulnerability*); dan (e). membebaskan diri dari mental budaya miskin serta merasa mempunyai harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).

Menurut Susetiawan (2002) kemiskinan dibagi dua jenis, yakni kemiskinan mutlak (*absolute poverty*) dan kemiskinan relatif (*relative poverty*). Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan garis kemiskinan. Seseorang miskin secara absolut jika pendapatan berada dibawah garis kemiskinan, sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan atau pengeluaran orang lain. Menurut Mubyarto (2002) yang sejalan juga dengan Potts (2003), kemiskinan adalah situasi serba kekurangan dari penduduk untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, yang disebabkan oleh keterbatasan modal yang dimiliki, rendahnya keterampilan, pengetahuan, dan lemahnya nilai tukar.

Menurut Sharp, et al. dalam Kuncoro (2004) sejalan dengan Tambunan (2001), penyebab perbedaan pendapatan masyarakat yang bermuara pada kemiskinan adalah: 1) Ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan; 2) Perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia sehingga produktivitas dan upah menjadi rendah; 3) Lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research*, yaitu bahwa kegiatan penelitian dilakukan melalui metoda kepustakaan dengan membaca, mencatat, dan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian, kemudian melakukan analisis fenomena yang ada berdasarkan pada hasil studi pustaka yang telah dikumpulkan tersebut untuk kemudian diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan penelitian (Zed, 2004). Dokumen yang digunakan berasal dari publikasi BPS, buku-buku referensi, dan berbagai jurnal baik nasional maupun internasional, serta dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Beberapa studi empiris menunjukkan determinan dari ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu : Adelman dan Morris (1973) dengan menggunakan teknik analisis diskriminan untuk mengamati hubungan antara berbagai indikator sosial dan ekonomi terhadap distribusi pendapatan, menemukan beberapa variabel penting yang mempengaruhi distribusi pendapatan yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga pendapatan per kapita menurun, inflasi, ketimpangan pembangunan antara wilayah, banyaknya investasi pada proyek padat modal sehingga pengangguran meningkat, kebijakan industri substitusi impor sehingga barang-barang industri naik untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju akibat ketidakpastian permintaan negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang, hancurnya industri-industri kerajinan rakyat termasuk industri rumah tangga.

Ahluwalia (1976) mengkaji hubungan antara kontribusi pendapatan kelompok masyarakat yang berbeda, dengan menggunakan data 60 negara, menemukan pola hubungan antara tingkat pembangunan dengan ketimpangan yang menyerupai kurva U terbalik (mendukung hipotesis Kuznets) dan memberikan kesimpulan antara lain: (1) faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapatan dapat diidentifikasi yaitu : (i) pergeseran intersektoral dalam struktur produksi yang menyebabkan penurunan relatif kontribusi sektor pertanian tradisional dan pergeseran secara paralel penduduk ke sektor perkotaan; (ii) pengembangan pendidikan dan tingkat keahlian tenaga kerja; dan (iii) transisi demografis yang menyebabkan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk. (2) rata-rata pendapatan dari kelompok pendapatan rendah meningkat sejalan dengan meningkatnya GNP per kapita, namun peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan kelompok berpendapatan tinggi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, hasil studi empiris yang dilakukan oleh Abdelbaki (2012) yang menganalisis ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendidikan di Bahrain, menunjukkan bahwa diantara berbagai penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan, yang terpenting adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan tingkat upah dan berkontribusi cukup besar terhadap distribusi pendapatan masyarakat.

Hoeller, P. et al (2012), menganalisis tentang pemetaan ketimpangan pendapatan antar negara OECD menemukan bahwa terjadinya ketimpangan pendapatan disebabkan karena ketimpangan dalam pendapatan tenaga kerja yang disebabkan oleh perbedaan dalam upah, jam kerja, dan tingkat kemalasan dari para pekerja.

Analisis cluster yang dilakukan dalam penelitian Hoeller, antara lain menunjukkan bahwa pada kelompok negara yang berbicara bahasa Inggris (Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK) dan Netherland diketahui bahwa penyebab ketimpangan pendapatan adalah adanya dispersi upah yang lebar dan *high share* dari pekerjaan paruh waktu menyebabkan ketimpangan pendapatan tenaga kerja diatas rata-rata OECD. Transfer tunai publik memberikan dampak redistribusi yang lebih besar, dan pajak rumah tangga yang bersifat

progresif sehingga menurunkan ketimpangan pendapatan, meskipun dispersi *disposable income* rumah tangga tersebut berada diatas rata-rata OECD. Kemudian, pada 5 negara *emerging countries* (Brazil, China, India, Indonesia, dan Afrika Selatan) menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ketimpangan pendapatan yang juga lebih tinggi daripada kebanyakan negara-negara OECD lainnya. Pengalaman di kelima negara ini menunjukkan bahwa program transfer dapat secara efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.

2. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Dan Kemiskinan

Perdebatan mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan serta kemiskinan dimulai pertama kali oleh Kuznets (1955) yang menyatakan bahwa keterkaitan antara pertumbuhan dan ketimpangan seperti kurva U terbalik: pada tahap awal pembangunan, distribusi pendapatan cenderung memburuk dan tidak akan meningkat sampai negara tersebut mencapai status berpendapatan menengah. Kuznets menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan semakin tinggi, maka ketimpangan akan semakin menurun. Implikasi lebih lanjut hipotesis kuznets sangat jelas jika pada tahap awal pertumbuhan akan menciptakan ketimpangan, maka kemiskinan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk berkurang di negara-negara berkembang (Adams, 2003).

Studi mengenai relasi antara pertumbuhan, ketimpangan, dan kemiskinan terus berlanjut. Hasilnya terdapat berbagai macam pandangan mengenai keterkaitan tersebut. Sebagian ekonom memandang bahwa hubungan antara keduanya merupakan hubungan kausal timbal balik (Barro, 2000; dan Bourguignon, 2004). Forbes (2000), Banerjee dan Duflo (2001), lebih mendukung pandangan yang mengatakan bahwa distribusi pendapatanlah yang mempengaruhi pertumbuhan. Namun sebagian besar ekonom justru berpandangan sebaliknya, bahwa pertumbuhanlah yang justru mempengaruhi ketimpangan dan kemiskinan (Kuznets, 1955; Dollar dan Kraay, 2001; Son dan Kakwani, 2003; dan Adams, 2003).

Pandangan yang terakhir ini yang kemudian melahirkan paradigma baru pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang berpihak kepada kaum miskin (*pro-poor growth*). Pertumbuhan hanya dapat dikatakan *pro-poor* jika sanggup menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Definisi yang lebih terukur dikemukakan oleh Klasen (2005), bahwa pertumbuhan hanya dapat disebut *pro-poor* jika tingkat pertumbuhan pendapatan orang miskin berada di atas tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata.

Gagasan Bank Dunia untuk pengentasan kemiskinan adalah *ending extreme poverty* dan *promoting shared prosperity*. Dalam kondisi terjadinya ketimpangan yang tinggi/meningkat, terutama ketika bersamaan dengan terbatasnya akses kesempatan bagi mereka yang kurang beruntung, pertumbuhan pendapatan rata-rata tidak akan bertambah secara proporsional bagi masyarakat lapisan bawah. Sehingga kesejahteraan bersama (*shared prosperity*), dipahami sebagai suatu cara tidak hanya redistribusi kue ekonomi pada ukuran yang tepat, tetapi kue tersebut harus diperluas secara terus menerus dan dibagikan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah sehingga secepat mungkin secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.

Narayan et al (2013) mengeksplor hubungan antara kesejahteraan bersama dengan pertumbuhan, ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan dalam kesempatan. Salah satu temuannya adalah bahwa tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dari pendapatan 40% penduduk berpendapatan terendah terjadi pada negara dengan ketimpangan yang menurun. 60% (31 dari 52) negara sampel dengan ketimpangan yang menurun menunjukkan pertumbuhan pendapatan 40% penduduk dengan pendapatan terendah, yang relatif lebih cepat (> 4% per kapita per tahun) dibandingkan dengan 33% (9 dari 27) negara sampel dengan ketimpangan yang meningkat.

Hasil empiris tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan negatif antara pertumbuhan pendapatan 40% kelompok berpendapatan terendah dengan ketimpangan pendapatan. Artinya, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maka perlu didukung adanya pemerataan pendapatan, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan temuan beberapa studi empiris yang ada, misalnya Bourguignon (2004) dan Lopez (2004), bahwa pertumbuhan hanya mempunyai dampak terhadap penurunan kemiskinan jika terjadi perubahan distribusi pendapatan secara progresif.

Dalam menganalisis keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan, Todaro (2009) menyatakan bahwa yang menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi meningkatkan standar hidup orang-orang miskin, bukan hanya fokus kepada tingkat pertumbuhan saja tetapi juga perlu diperhatikan karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) yang terjadi.

3. Solusi yang Perlu Dilakukan untuk Mengatasi Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Todaro (2009) mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan diperlukan suatu paket kebijakan yang saling melengkapi satu sama lain, yang meliputi empat unsur pokok kebijakan yang ditujukan untuk : (1) menghilangkan distorsi harga faktor, (2) tercapainya perubahan struktural di dalam distribusi asset, kekuasaan dan akses pendidikan, yang disertai dengan kesempatan-kesempatan untuk memperoleh penghasilan, (3) memperbaiki distribusi pendapatan: untuk golongan ekonomi kuat ditempuh melalui kebijakan perpajakan atas pendapatan dan kekayaan mereka, sedangkan untuk golongan ekonomi lemah ditempuh melalui penyediaan tunjangan finansial serta barang dan jasa konsumsi, (4) meningkatkan pengembangan teknologi tepat guna dan pembangunan yang menekankan pada penyediaan fasilitas perawatan kesehatan, perumahan, pelatihan yang murah, perbaikan sarana pertanian, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Cingano (2014).

Dollar dan Kray (2001) mengatakan bahwa pertumbuhan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi si miskin jika pertumbuhan disertai dengan kebijakan penegakan hukum, disiplin fiskal, keterbukaan dalam perdagangan internasional, dan strategi pengentasan kemiskinan.

Kebijakan *World Bank Group* (WBG) untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bersama tidak hanya meningkatkan dimensi moneter dari kesejahteraan, tetapi juga dimensi non moneter, yang meliputi antara lain: pendidikan, kesehatan, nutrisi dan akses terhadap infrastruktur esensial, pemberdayaan dan mendorong partisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. (*World Bank*, 2013).

Banyak cara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pertumbuhan ekonomi jelas fundamental. Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kesejahteraan jika pola pertumbuhan mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan penduduk.

Fakta lain juga menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan dan kemiskinan lebih tinggi ketika pertumbuhan mengarah kepada sektor padat tenaga kerja (Loayza and Raddatz, 2010, dalam Narayan, 2013). Tetapi untuk mencapai hal tersebut, pertumbuhan perlu untuk didiversifikasi dan untuk mendorong kesempatan kerja pada berbagai sektor. Sedangkan proses transformasi ekonomi didorong oleh sektor swasta, negara perlu untuk berperan secara terbatas tapi memainkan peran yang krusial untuk meningkatkan persaingan, menciptakan iklim investasi, dan meningkatkan inovasi dalam sektor swasta. Peran ini meliputi penyediaan peraturan dan lingkungan makroekonomi yang memberikan kestabilan dan insentif bagi sektor swasta, dan investasi dalam barang-barang publik seperti infrastruktur fisik dan manusia untuk membangun tenaga kerja modern.

Disamping itu, juga perlu memperhatikan kesehatan dan kestabilan kontrak sosial yang menjamin bagi masyarakat miskin. Kontrak sosial antara lain dapat menghasilkan program perlindungan sosial. Kontrak sosial yang mendorong kesejahteraan bersama juga harus memperkenankan investasi sosial dalam institusi yang meningkatkan kesempatan bagi semua. Redistribusi sumberdaya tidak hanya sekedar transfer pendapatan dari satu kelompok masyarakat ke kelompok yang lain, tetapi lebih kepada investasi dalam peningkatan kemampuan masyarakat sepanjang waktu dan antar generasi, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu, untuk menghasilkan sumberdaya yang dibutuhkan seperti untuk investasi yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan berkelanjutan yang lebih tinggi sepanjang waktu. Pertumbuhan ekonomi mendorong kemampuan manusia yang lebih tinggi, yang memberikan umpan balik terhadap pertumbuhan. (*World Bank*, 2013).

Hoeller, P et al. (2012) menyatakan bahwa pengalaman di sebagian besar negara yang termasuk kelompok *emerging economies*, program transfer apabila tepat sasaran akan menjadi kekuatan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pengalaman Indonesia menunjukkan pada tahun 2005, dengan menerapkan program perlindungan sosial yang diimplementasikan dalam bentuk transfer tunai, telah mampu secara efektif mengurangi kemiskinan dan ketimpangan khususnya selama periode krisis.

Upaya pengurangan kemiskinan harus sejalan dengan upaya untuk pemerataan pendapatan, karena menurut van Leeuwen and Földvári (2016) bahwa ketimpangan mempengaruhi kemiskinan.

4. Pentingnya Peran Digital Ekonomi Dalam Era Revolusi Industri 4.0

Terkait dengan pernyataan Todaro (2009) yang menekankan pentingnya peran teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peran digital ekonomi dalam era Revolusi Industri 4.0 menjadi sangat penting. Dalam era ini, peran informasi disamping sebagai sarana untuk berkomunikasi, juga dapat menjadi sumber keuntungan yang utama bagi suatu perekonomian. Aktivitas ekonomi secara berkelanjutan diyakini mampu ditingkatkan melalui berkembangnya digital ekonomi.

Dalam perspektif digital ekonomi, kepemilikan sumberdaya tidak harus mutlak dimiliki oleh setiap individu tetapi kepemilikan sumberdaya dapat bersifat *sharing economy*. Sehingga hal tersebut memberi kesempatan kepada setiap individu untuk berkontribusi dan terlibat dalam aktivitas ekonomi walaupun dalam kepemilikan asset yang terbatas. Hal ini dapat memberikan peluang bagi setiap orang untuk mendapatkan penghasilan. Dengan demikian berkembangnya digital ekonomi dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.

Peran revolusi industri 4.0 melalui berkembangnya digital ekonomi dapat dilihat dalam gambaran perekonomian Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa digital ekonomi dipercaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk dan jasa baik di level makro maupun mikro. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan industri *e-commerce local* yang lebih terarah melalui dibentuknya *e-commerce roadmap*.

Era Revolusi Industri 4.0 semakin mendekatkan hubungan antara produsen dan konsumen dan hubungan diantara mereka pun semakin mudah. Berkembangnya teknologi informasi juga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk mendapat pasar yang lebih luas bagi produk yang dihasilkannya, sehingga diharapkan dengan meluasnya pasar akan mendorong usaha UMKM tersebut semakin berkembang. Dalam era digital ekonomi, fokus utama dalam melakukan aktivitas ekonomi bukan lagi persaingan, tetapi lebih berlandaskan kerjasama (*sharing economy*). Oleh karena itu, konsep kemitraan menjadi sangat penting. Dalam proses pemantapan kemitraan, harus memperhatikan tiga hal utama, yaitu harus ada kesamaan visi dan misi, ada kepercayaan, dan masing-masing pihak memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan kerjasama (Nuryanto, 2018).

Berkembangnya digital ekonomi telah memberikan pengaruh positif bagi perekonomian Indonesia. Salah satu indikatornya terlihat dari adanya pergeseran dominasi nilai valuasi perusahaan dari energi atau minyak pada awal tahun 2016 menjadi didominasi oleh perusahaan berbasis teknologi pada saat ini (Yudhistira, 2018).

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jika pengembangan Revolusi Industri 4.0 dilakukan dengan tepat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 6%-7% pada 2030. Melalui program *making Indonesia 4.0*, diperkirakan akan terjadi peningkatan pertumbuhan PDB Indonesia antara 1%-2% per tahun dari *baseline* selama periode 2018-2030 sebesar 5% menjadi 6%-7%. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan ekonomi yang lebih efisien dengan dukungan pertumbuhan industri manufaktur yang lebih besar. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, Bappenas melihat akan ada

potensi penambahan 10 juta lapangan pekerjaan dibandingkan *baseline* hingga 2020. Jika *baseline*-nya 20 juta penciptaan lapangan kerja dalam periode tertentu, maka dengan industri 4.0 akan naik menjadi 30 juta (Brodjonegoro, B.P.S. dalam Alaydrus, 2019).

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari berkembangnya revolusi industri 4.0, maka perlu proses pengembangan yang tepat. Sehingga dampak positifnya akan semakin besar. Selama pertumbuhan ekonomi terjadi, maka penciptaan lapangan kerja akan terus terjadi pula dan hal ini dapat memberikan *multiplier effect* yang terus berlanjut.

Menurut estimasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berkembangnya industri 4.0 yang dilakukan secara tepat akan mampu meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur lebih dari 20% terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2030.

Dengan berkembangnya era digital ekonomi melalui revolusi industri 4.0 telah mempertegas pentingnya peran teknologi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maka perlu pemanfaatan secara optimal potensi ekonomi digital yang berkembang saat ini. Ide utama ekonomi digital adalah meningkatkan produktivitas melalui inovasi dan teknologi. Sehingga fungsi GDP dirumuskan sebagai berikut (Ichwan, 2019):

$$GDP_t = Z_t F(K_t, L_t)$$

Z = Technology, K = Kapital, L = Tenaga kerja

KESIMPULAN

1. Determinan ketimpangan distribusi pendapatan antara lain : pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi, ketimpangan pembangunan antara wilayah, banyaknya investasi pada proyek padat modal, kebijakan industri substitusi impor, memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, pergeseran intersektoral dalam struktur produksi dari sektor pertanian ke industri dan pergeseran penduduk ke sektor perkotaan, ketimpangan pengembangan pendidikan dan tingkat keahlian tenaga kerja, ketimpangan dalam pendapatan tenaga kerja.
2. Walaupun terdapat banyak perdebatan para ekonom mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan, tetapi sebagian besar ekonom lebih mendukung hipotesis Kuznets yang menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi sampai pada suatu tingkat pendapatan tertentu, maka ketimpangan distribusi pendapatan akan semakin rendah dan pada akhirnya tentu saja kemiskinan berkurang. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu disertai adanya pemerataan pendapatan, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan.
3. Berdasarkan literature review yang dilakukan, untuk solusi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, maka :
 - 1) Perlu kebijakan yang terintegrasi berupa kebijakan yang ditujukan untuk menghilangkan distorsi-distorsi harga faktor, kebijakan yang dimaksudkan untuk tercapainya perubahan struktural di dalam distribusi asset, kekuasaan dan akses pendidikan, yang disertai dengan kesempatan-kesempatan untuk memperoleh

penghasilan, kebijakan perbaikan distribusi pendapatan melalui pajak dan tunjangan finansial, dan kebijakan untuk meningkatkan pengembangan teknologi tepat guna.

- 2) Pertumbuhan ekonomi perlu disertai dengan kebijakan penegakan hukum, disiplin fiskal, keterbukaan dalam perdagangan internasional, dan strategi pengentasan kemiskinan,
- 3) Meningkatkan dimensi moneter dan non moneter, yang meliputi antara lain: pendidikan, kesehatan, nutrisi dan akses terhadap infrastruktur esensial, pemberdayaan dan mendorong partisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.
- 4) Perlu pola pertumbuhan mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan penduduk.
- 5) Perlu keterlibatan sektor swasta untuk mendorong proses transformasi ekonomi, disertai campur tangan negara untuk meningkatkan persaingan, menciptakan iklim investasi, dan meningkatkan inovasi dalam sektor swasta.
- 6) Perlu memperhatikan kesehatan dan kestabilan kontrak sosial yang menjamin bagi masyarakat miskin.
- 7) Redistribusi sumberdaya harus lebih diarahkan kepada investasi dalam peningkatan kemampuan masyarakat sepanjang waktu dan antar generasi, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 8) Perlu pengembangan teknologi informasi secara tepat sehingga dampak dari proses digitalisasi ekonomi dalam era revolusi industri 4.0 mampu memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berhasil diciptakan.

SARAN

Untuk menjamin terwujudnya solusi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan, maka diperlukan pemerintahan yang cerdas, kuat, bersih, dan berwibawa sehingga berbagai kebijakan yang ditempuh dapat efektif dan efisien.

Khusus untuk program dalam rangka pemberdayaan masyarakat, maka perlu pemberian motivasi yang berkelanjutan pada segenap jajaran yang terlibat dalam program tersebut, untuk tidak hanya sekedar mengerti dan paham saja akan tujuan program tetapi lebih tertuju kepada pelaksanaan kegiatan yang benar baik secara organisasi, manajemen dan sasaran kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelbaki, Hisham H, 2012. An Analysis of Income Inequality and Education Inequality in Bahrain. *Modern Economy*, 2012, 3, 675-685. <http://www.SciRP.org/journal/me>
- Adams, Richard H. Jr. 2003. Economic Growth, Inequality, and Poverty: Finding from a New Data Set. *Policy Research Working Paper 2972*. World Bank. February.

- Adelman, Irma, and Morris, Cynthia, 1973. *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, California, Stanford University Press. <http://books.google.co.id/>
- Ahluwalia, M.S. 1976. Inequality, Poverty, and Development. *Journal of Development Economics* Volume 3 issue 4. Desember, 1976. Pp 307-342. www.sciencedirect.com.
- Alaydrus, Hadijah. 2019. *Revolusi Industri 4.0 Diyakini Mampu Dorong Pertumbuhan Hingga 7% pada 2030*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190313/9/899273/revolusi-industri-4.0-diyakini-mampu-dorong-pertumbuhan-hingga-7-pada-2030>. Diakses 22 April 2019.
- Badan Pusat Statistik, 2018. *Data Sosial dan Kependudukan*, <http://www.bps.go.id/>
- Banerjee, A. And E. Duflo. 2003. Inequality and growth: what can data say? *Journal of Economic Growth*, volume 8, pp 267-299.
- Bappenas. 2009. Pengembangan Program Pengentasan Kemiskinan
<http://www.bappenas.go.id>.
- Barro, Robert J. 2000. Inequality and Growth in a Panel of Countries. *Journal of Economic Growth* 5(1): 5-32. <http://web.worldbank.org/>
- Bourguignon, Francois, 2004. *Poverty-Growth-Inequality Triangle*, Paper was presented at the Indian Council for Research on International Economic Reations, New Delhi, on Februari 4, 2004.
- Cingano, Federico. 2014. Trends In Income Inequality And Its Impact On Economic Growth. *OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 163*. DELSA/ELSA/WD/SEM(2014)9. <https://doi.org/10.1787/1815199X>
- Dollar, David and Aart Kraay. 2001. Growth is Good for the Poor. *Policy Research Working Paper 2587*. <http://web.worldbank.org/website/external/>
- Forbes, Kristin J. 2000. Reassessment of The relationship between inequality and growth. *American Economic Review* volume 90 No. 4. September 2000 pp 869-887.
- Gini, Corrado. 1921, *Measurement of Inequality and Incomes*. *The Economic Journal* 31. No. 121 (<http://en.wikipedia.org>).
- Gunawan, Sumodiningrat, 2002. *Sinkronisasi Program Penanggulangan kemiskinan*. Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM. Yogyakarta.
- Hoeller, P. Et al., 2012. Less Income Inequality and More Growth-Are They Compatible? : Part 1. Mapping Income Inequality Across the OECD, *OECD Economics Departement Working Papers*, No. 924, OECD Publishing. Retrived from <http://dx.doi.org/10.1787/5k9h297wxbnr-en>.
- Ichwan, Nurul. 2019. *Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*, Materi Kuliah Umum, Purwokerto, 22 Maret 2019.
- Klassen, Stephen. 2005. *Economic Growth and poverty reduction: measurement and polisy issues*. Working Paper No. 246. <http://www.oecd.org/dev/35393795.pdf>.

- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- . 2010. *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*, Erlangga, Jakarta.
- Kuznets, Simon. 1955. Economic Growth and Income Inequality, *The American Economic Review* Vol. 45. No. 1, pp. 1-28.
- Lopez, J. Humberto. 2004. Pro-Growth, Pro Poor: is there a trade off?. *Policy research working paper #3378*. The World Bank. <http://books.google.co.id/books?>
- Mubyarto. 2002. Ekonomi Rakyat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Rakyat* Th.I-No.1-Maret 2002.
- Narayan, Ambar, Jaime Saavedra-Chanduvi, and Sailesh Tiwari, 2013. Shared Prosperity: Links to Growth, Inequality and Equality of Opportunity. *Inequality in Focus*, October 2013, The World Bank. <http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/inequality-in-focus-october-2013>
- Nuryanto, Rully, 2018. Revolusi Industri 4.0, Era Ekonomi Berbagi, Workshop & Temu Bisnis Nasional UMKM bertema “Mewujudkan Sinergi Kemitraan UMKM Menuju Usaha Kecil Yang Tangguh dan Berdaya Saing di Era Revolusi Industri 4.0”, 31 Oktober 2018. <https://ugm.ac.id/id/berita/17335-revolusi.industri.40.era.ekonomi.berbagi>. Diakses 20 April 2019
- Potts, David, 2003. *Development Planning and Poverty Reduction*, Palgrave Macmillan. New York.
- Romer, David. 2012. *Advanced Macroeconomics*. Fourth Edition. New York: McGraw-Hill.
- Son, H. And N. Kakwani, 2003. *Poverty Reduction: Do Initials Condition Matter?*. Mimeo, The World Bank. <http://www.worldbank.org/>
- Suharyadi, A, Hadiwidjaja, G, and Sumarto, S. 2012. Economic growth and poverty reduction in Indonesia before and after the asian financial crisis. *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 48(2). <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.694155>
- Susetiawan, 2002. *Pengembangan Lokalitas Dalam perspekif Sosial Budaya*. Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM. Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus T.H. (2001), *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Todaro, Michael P and Stephen C. Smith, 2009. *Economic Development*, Eleventh Edition, Pearson Education Limited, England.
- UNDP Report, 2013. *Human Development Indicators*, <http://hdr.undp.org/en/data>
- Van Leeuwen, Bas and Földvári, Péter. 2016. The Development of Inequality and Poverty in Indonesia, 1932–2008. *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.52 (3). <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1184226>

World Bank, 2013. *Inequality in Focus, October 2013*, The World Bank.
<http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/inequality-in-focus-october-2013>.

Yudhistira, Bhima, 2018. *Potensi Ekonomi Digital di Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0*
<https://www.wartaekonomi.co.id/read201172/potensi-ekonomi-digital-di-indonesia-dalam-revolusi-industri-40.html>. Diakses tanggal 20 April 2019.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.